



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Dinas Perhubungan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan dan hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 134

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN**

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah salah satu langkah penting dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam Menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah Ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 83, bahwa Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja Dinas Perhubungan dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas Dinas Perhubungan sehingga dapat memenuhi arah kebijakan Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dengan tetap memperhatikan RPD dan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Dinas Perhubungan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan dan atau realisasi APBD.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan pada tahun sebelumnya. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2022, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2022) sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 terlampir. Hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut Tabel T-C.29 / Tabel 2.1 yang menyajikan data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah :

Tabel T-C.29/Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2021										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentas pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		98					98	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Presentase Jumlah Dokumen Administrasi		100					100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2					2	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2					2	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan		320					320	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah		100					100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tunjangan		87					87	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan		67					67	
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terpenuhinya tertib administrasi barang milik daerah yang terasuransi		100					100	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan		9					9	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	presentase Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100					100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		35					35	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK		56					56	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		19					19	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan surat kabar		12					12	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu		1353					1.353	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah SKPD		12					12	
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya barang milik daerah yang sesuai		0					-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		0					-	
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100					100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik selama 12 bulan		288					288	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang / jasa		276					276	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100					100	
	Penyediaan Jasa	Jumlah pemeliharaan rutin /		41					41	
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	berkala kendaraan dinas / operasional								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		36					36	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor		1					1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor		60					60	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Wilayah yang terlayani angkutan umum di jaringan jalan kabupaten		12,17					12	
		presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan		100					100	
1	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten		100					100	

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang		7					7	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		2					2	
2	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Presentase Pengelolaan Terminal		100					100	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal		3					3	
3	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN	presentase terlaksananya penerbitan izin		100					100	

	DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir								
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah laporan parkir yang dikelola		12					12	
4	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Presentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100					100	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Diadakan		1					1	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi		12500					12.500	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang Disediakan		12500					12.500	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		3					3	
5	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten		100					100	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan Kabupaten	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten		24					24	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian		12					12	
6	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG	presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten		100					100	

	DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) daerah kabupaten	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum		116736					116736	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum		13,5					14	
7	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan		100					100	

	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kebijakan yang dilaksanakan		6					6	
8	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten		0					-	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Ijin Trayek		0					0	
2022-2023										
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG	Persentase pemenuhan	200%		100%	100%	100%	100%	200%	100%

	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan								
2.15.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	18		9	9	100%	9	18	100%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana perangkat daerah	5		3	3	100%	2	5	100%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9		2	2	100%	7	9	100%

2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		4	4	100%	2	6	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1					1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1					1	1	100%
2.15.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	24		12	12	100%	12	2400%	100%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1860		888	912	103%	972	1.884	101%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24		12	12	100%	12	24	100%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3		1	1	100%	2	3	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4					4	4	100%
	pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	60					60	60	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12					12	12	100%

2.15.01.2.02	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	terlaksananya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2		1	1	100%	1	2	100%
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2		1	1	100%	1	2	100%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2					2	2	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4					4	4	100%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4					4	4	100%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2					2	2	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4					4	4	100%
2.15.01.205	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	24		12	12	100%	12	24	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4					5	5	125%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4					4	4	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9					9	9	100%

	Pendidikan dan Pelatihan Pgwai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	jumlah aparatur yang melaksanakan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	51		1	1	100%	50	51	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50					50	50	100%
2.15.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	17		6	6	100%	11	17	100%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12					12	12	100%
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	21		15	15	100%	6	21	100%
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	61		60	60	100%	1	61	100%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40		20	20	100%	20	40	100%
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	13		1	1	100%	12	13	100%
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20		12	12	100%	8	20	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36		12	12	100%	24	36	100%
2.15.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	20		8	8	100%	12	20	100%
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5		4	4	100%	1	5	100%

	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2		1	1	100%	1	2	100%
	pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1					1	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23		3	3	100%	20	23	100%
	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1					1	1	100%
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100		100	100	100%	100	200	200%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		12	12	100%	12	24	100%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12					12	12	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12					12	12	100%
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat masuk dan keluar yang diregister	12					12	12	100%
2.15.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerinrah Daerah	24		12	12	100%	12	24	100%

2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74		36	36	100%	38	74	100%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74		36	36	100%	38	74	100%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8		7	7	100%	1	8	100%
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120		40	40	100%	80	120	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase masyarakat yang terlayani angkutan pada wilayah kabupaten pasuruan	33%		34%	21,77%	64%	33%	0,33	100%
		Jumlah wilayah yang terkoneksi angkutan	51		48	48	100%	51	51	100%
		prosentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan	75%		75%	98,70%	132%	75%	0,75	100%
		prosentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun	80%		80%	66,67%	83%	80%	0,8	100%
		prosentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	96%		95%	101,32%	107%	96%	0,96	100%
2.15.02.2.01	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi	12		7	6	86%	5	11	92%

2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7		3	2	67%	4	6	86%
2.15.02.2.01.03	Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6		4	4	100%	2	6	100%
2.15.02.2.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	56665		48.654	33.916	70%	8011	41.927	74%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.017		1.206	987	82%	811	1.798	89%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3					3	3	100%

2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	54648		47.448	32.983	70%	7200	40.183	74%
2.15.02.2.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal	13		1	1	100%	12	13	100%
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	2		1	1	100%	1	2	100%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	3					3	3	100%
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	45		20	20	100%	25	45	100%
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	6		3	3	100%	3	6	100%

2.15.02.2.04	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir	170		170	170	100%	170	170	100%
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24		12	12	100%	12	24	100%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12					12	12	100%
2.15.02.2.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24		12	12	100%	12	24	100%
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4		1	1	100%	3	4	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	3					3	3	100%
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	33.000		18.000	16.256	90%	15000	31.256	95%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18012		12	12	100%	18000	18.012	100%

2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1					1	1	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4					4	4	100%
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1					1	1	100%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11		2	2	100%	9	11	100%
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12					12	12	100%
2.15.02.2.06.01	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Rasio Kapasitas Jalan (Volume/Kapasitas)	0,31		0,3	0,3	100%	0,31	0,31	100%
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12					12	12	100%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	200		100	100	100%	100	200	100%

2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5		2	-		3	3	60%
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	16		4	4	100%	12	16	100%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8		4	4	100%	4	8	100%
2.15.02.2.07	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	jumlah dokumen andalalin yang di tetapkan	50		20	20	100%	30	50	100%
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	22		4	4	100%	18	22	100%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	2					2	2	100%
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah kegiatan pengawasan pelaksanaan hasil penilaian andalalin	16		4	4	100%	12	16	100%
2.15.02.2.08	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ	7		3	3	100%	4	7	100%
2.15.02.2.08.02	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4					4	4	100%
	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1					1	1	100%

2.15.02.2.08.04	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3					3	3	100%
2.15.02.2.08.05	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	10		4	4	100%	6	10	100%
2.15.02.2.09	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	260		190	57	30%	70	127	49%
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	260		190	57	30%	70	127	49%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12					12	12	100%
2.15.02.2.12	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN /KOTA	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	7		6	7	117%	1	8	114%
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2		1	1	100%	1	2	100%

2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2					2	2	100%
2.15.02.2.11	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan							-	-
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang Dibuat							-	-
2.15.02.2.13	PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi	35%		35%	-	0	35%	0	
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1		1	-		1	1	100%
2.15.02.2.14	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	85		52	25	48%	55	80	

2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pengusaha yang melaksanakan fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan	16		4	4	100%	12	16	100%
	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0		-	-		0	-	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan	1		5	1	20%	1	2	200%
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan yang wilayah operasinya kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan fasilitasi perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi	4		-	-	0%	4	4	100%
	PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek	1		-			1	1	100%

	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	-				1	1	100%
--	---	--	---	---	--	--	--	---	---	------

Berikut Tabel 2.1.A yang menjelaskan terkait analisis kinerja pencapaian Renstra 2018 – 2023 :

Tabel 2.1.A

Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra Tahun 2019 - 2020	Capaian Renstra Tahun 2020 - 2021	Capaian Renstra Tahun 2021 - 2022	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ					
Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	75,0%			Terdapat prioritas penganggaran lain sehingga anggaran digeser	Membuat perencanaan penganggaran dan kinerja menyesuaikan dengan kebutuhan
Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan alat Pengaman Isyarat Lalu Lintas	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Marka Jalan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana parkir khusus	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Pendukung Fasilitas LLAJ	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN					
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Di Lingkungan Terminal	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Kegiatan Pengamanan, Pengaturan Dan Penertiban Lalu Lintas Serta Pengawasan Pejabat Daerah	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Sosialisasi di Bidang Perhubungan Laut	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
Pembangunan Gedung Terminal	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS					
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR					
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100,0%			Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM					
Fasilitasi Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Angkutan Umum		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Angkutan		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN					
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Perhubungan		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Transportasi		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Sistem Informasi Managemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS KESELAMATAN JALAN					
Rencana Pembangunan Sarana Fasilitas Perhubungan		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengembangan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN					

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keselamatan Lalu Lintas		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Koordinasi Peningkatan Keselamatan LLAJ		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENGAMAN LALU LINTAS					

Pelayanan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengelolaan Terminal		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengelolaan Perparkiran		100,0%		Perencanaan kinerja dan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Persentase masyarakat yang terlayani angkutan pada wilayah Kabupaten Pasuruan			65,0%	Belum adanya rencana umum jaringan trayek dimana evaluasi terhadap ketersediaan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan masih belum dilakukan	Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan
Jumlah wilayah yang terkoneksi angkutan			25,0%	Belum adanya rencana umum jaringan trayek dimana evaluasi terhadap wilayah yang perlu disediakan angkutan umum masih belum dilakukan	Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan
Persentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan			132,0%	Pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan di wilayah prioritas sudah tercapai	Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan pembangunan prasarana dan perlengkapan jalan
Persentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun			83,0%	Terdapat pengeseran anggaran dimana pemeriksaan keselamatan kendaraan menjadi prioritas sehingga dokumen yang dibuat tidak memenuhi target	Menganggarkan penyusunan dokumen Rencana Induk LLAJ dimana turunannya akan dibuat rencana umum jaringan trayek pedesaan dan perkotaan
Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor			111,0%	Terdapat tambahan numpang uji keluar sehingga target kinerja dapat tercapai	Pembuatan penyusunan rencana anggaran dan kinerja sesuai kebutuhan

PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA			86,0%	Tidak tercapainya pada sub kegiatan pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kegiatan	Perencanaan dibuat melalui evaluasi sebelumnya
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten			67,0%	Terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ tidak dapat tercapai	Penyusunan anggaran penyusunan rencana induk jaringan LLAJ disesuaikan dengan kebutuhan
Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota			100,0%	Perencanaan penganggaran dan kinerja sudah sesuai sehingga realisasi tercapai	Pembuatan target kinerja dan anggaran disesuaikan
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA			69,8%	Keterbatasan anggaran, sehingga hanya wilayah prioritas saja yang terbangun perlengkapan jalan	Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan penyediaan perlengkapan jalan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			82,0%	Keterbatasan anggaran, sehingga hanya wilayah prioritas saja yang terbangun perlengkapan jalan	Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan penyediaan perlengkapan jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			70,0%	Keterbatasan anggaran, sehingga pemeliharaan hanya difokuskan pada perlengkapan jalan yang rusak dari hasil survey dan aduan masyarakat	Memanfaatkan alternatif penganggaran lain selain APBD sehingga dapat memaksimalkan pemeliharaan perlengkapan jalan
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C			100,0%	Pencapaian kinerja sudah tercapai dimana sub kegiatan dalam pengelolaan terminal penumpang tipe C sudah tercapai semua	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe C			100,0%	Dokumen perencanaan terminal terpenuhi	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			100,0%	Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk pengembangan sarana dan prasarana terminal	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			100,0%	Alokasi anggaran sudah mencukupi rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR			100,0%	Pencapaian kinerja pada pengelolaan parkir sudah sesuai dengan penganggaran yang direncanakan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100,0%	Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan parkir	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR			111,0%	Terdapat tambahan numpang uji keluar sehingga target kinerja dapat tercapai	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100,0%	Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			90,0%	Kendaraan yang diuji di tahun berjalan lebih sedikit dari wajib uji	Melakukan sosialisasi dan insentif terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100,0%	Alokasi anggaran sudah mencukupi untuk penyediaan bukti lulus uji	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100,0%	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian sudah sesuai dengan rencana penganggaran	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA			100,0%	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sudah sesuai dengan perencanaan penganggaran	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			100,0%	Pengadaan perlengkapan jalan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas sudah sesuai dengan perencanaan penganggaran	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0,0%	Anggaran digeser untuk memenuhi kebutuhan pengamanan dan pengaturan jalan	Membuat prioritas terhadap pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			100,0%	Pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan terpenuhi anggarannya	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota			100,0%	Pelaksanaan Forum LLAJ sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA			100,0%	Kegiatan persetujuan andalalin sudah sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			100,0%	Perencanaan penganggaran koordinasi hasil andalalin sesuai dengan kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			100,0%	Pengawasan hasil rekomendasi andalalin telah terpenuhi sesuai target	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ			100,0%	Kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sudah sesuai dengan perencanaan kinerja dan anggaran	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			100,0%	Pengawasan hasil rekomendasi andalalin telah terpenuhi sesuai target	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			30,0%	Kegiatan penyediaan angkutan umum tidak tercapai dimana perencanaan jaringan trayek angkutan umum belum dibuat	Membuat rencana umum jaringan trayek dan sosialisasi terhadap operator angkutan. Selain itu, diperlukan persiapan untuk pembuatan BUMD untuk menggabungkan beberapa operator angkutan dalam satu manajemen
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			30,0%	Tidak tercapai karena perencanaan yang kurang sesuai dimana angkutan sekolah gratis tidak mampu diserap karena masa transisi pasca pandemi yang menyebabkan mundurnya jadwal masuk sekolah	Membuat perencanaan yang matang terhadap jadwal sekolah, jumlah sekolah, serta jumlah armada yang akan dikerjasamakan sebagai angkutan sekolah gratis
PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 DAERAH KABUPATEN /KOTA			117,0%	Kegiatan dalam persiapan penetapan rencana umum jaringan trayek tercapai kinerjanya	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota			100,0%	Survey terkait rencana umum jaringan trayek pedesaan terlaksana sesuai kebutuhan	Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan
PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,0%	Kinerja kegiatan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi tidak tercapai untuk memenuhi prioritas lain	Perlunya persiapan berupa survey untuk mendapatkan data pendukung dalam penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota			0,0%	Anggaran digeser untuk memenuhi penyediaan angkutan	Perlunya persiapan berupa survey untuk mendapatkan data pendukung dalam penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,0%	Kegiatan tidak tercapai untuk memenuhi prioritas kegiatan lain	Perlu adanya sosialisasi dan inovasi terhadap penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0,0%	Anggaran digeser untuk memenuhi penyediaan angkutan	Perlu adanya sosialisasi dan inovasi terhadap penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

<p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>			<p>20,0%</p>	<p>Realisasi kinerja hanya 1 dokumen dari target 5 dokumen yang dibuat</p>	<p>Perlu adanya survey dan koordinasi dengan stakeholder terkait terkait penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi</p>
<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan yang wilayah operasinya kewenangan Kabupaten/Kota</p>			<p>100,0%</p>	<p>Koordinasi terkait izin penyelenggaraan taksi telah terlaksana sesuai kebutuhan</p>	<p>Mempertahankan rencana kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan</p>

Dari penyajian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa :

2.1.1. Sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan tercapai target kinerjanya, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan, dimana perencanaan yang tepat merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Dalam perencanaan kinerja dan penganggaran, Dinas Perhubungan harus mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta Tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujaun tersebut, dimana Tindakan ini meliputi anggaran, waktu dan sumber daya lainnya.

Dalam pencapaian kinerja sampai tahun berjalan, Dinas Perhubungan memiliki kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga kebutuhan anggaran pada kegiatan tersebut dapat mengikuti dari evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya dengan adanya penyesuaian sesuai kondisi. Hal ini yang menyebabkan pencapaian kinerja dapat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

- b. Penggunaan alternatif penganggaran selain APBD, dimana program - program prioritas Kabupaten Pasuruan yang tidak dapat dipenuhi dari APBD dapat dilaksanakan melalui penambahan anggaran selain APBD. Salah satu alternatif penganggaran APBD yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam pencapaian kinerja 2019 - 2023 adalah DBHCHT. Anggaran DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak hasil tembakau yang dikenakan pada produk - produk tembakau seperti rokok, cerutu, dan lain sebagainya. DBHCHT merupakan salah satu bentuk redistribusi pajak yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penggunaan DBHCHT di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan digunakan untuk pemasangan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, serta pelaksanaan angkutan sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu.

2.1.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak mencapai target kinerja pada perangkat daerah dapat memiliki berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, atau masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan kurangnya anggaran, maka terdapat kegiatan yang lebih diprioritaskan untuk dapat dipenuhi daripada kegiatan lainnya sehingga kegiatan yang tidak dapat anggaran tidak dapat tercapai secara maksimal dari realisasi kinerjanya. Selain itu, terdapat masalah dalam perencanaan dimana dokumen perencanaan atau data pendukung pada suatu kegiatan belum menjadi perhatian sehingga pelaksanaan kegiatan cenderung sama setiap tahunnya. Hal ini menjadi permasalahan terutama pada kegiatan teknis pada Dinas Perhubungan yang harus mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya. Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi perencanaan transportasi makro Kabupaten Pasuruan belum dibuat, sehingga perencanaan turunannya seperti Rencana Umum Jaringan Trayek

Pedesaan/Perkotaan tidak dapat terlaksana. Selain itu, data – data pendukung yang tidak akurat atau tidak lengkap mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga program yang dijalankan tidak optimal dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

2.1.3. Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :

2.1.4. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :

- a. Kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemungkinan angka inflasi;
- b. Memberikan rincian terhadap untuk kegiatan prioritas untuk kelengkapan informasi bagi penentu kebijakan anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 maupun perkiraan capaian tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana SDM tersebut

dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;

- b. Perlu adanya sinkronisasi jadwal perencanaan dan monitoring evaluasi agar capaian kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat membuat upaya pencegahan jika proyeksi capaian tidak mampu memenuhi target;
- c. Perlu adanya pembuatan *data center* serta manajemen pengelolaan data secara elektronik agar perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai 1 (satu) tujuan “Meningkatnya Konektivitas Wilayah” serta 2 (dua) sasaran : Meningkatkan Wilayah yang Terkoneksi Sarana Angkutan Umum yang Berkeselamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas, maka untuk mewujudkan kinerja pelayanan di bidang Perhubungan maka diperlukan langkah – langkah untuk menjawab permasalahan dan hasil analisa pelayanan kinerja PD antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi melalui sistem angkutan umum yang terintegrasi;
2. Meningkatnya pemeliharaan serta pemasangan terhadap perlengkapan jalan seperti PJU, Rambu, Marka, APILL dan fasilitas pendukung LLAJ lainnya agar dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta memberikan kenyamanan pada pengguna jalan;
3. Penyediaan simpul transportasi berupa terminal yang berkualitas baik;
4. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor baik dari sisi sarana maupun prasarana;
5. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan lanjutan yang sudah direncanakan sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Adapun data yang berkaitan dengan pelayanan perhubungan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2A

Updating Perlintasan Kereta Api di Wilayah Kabupaten Pasuruan

NO	NAMA TITIK PERLINTASAN SEBIDANG	KOORDINAT		PERLINTASAN N SEBIDANG					PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG		KONDISI EKSISTENSI	FOTO LOKASI
		X	Y	DIJAGA PEMUDA	DIJAGA PT. KAI	DIJAGA SUKARELAWAN	TIDAK DIJAGA	LIAR	FLYOVER	UNDER PASS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PT. Meiji Latek - ke arah Pekoren Rembang Kec. Bangil (JPL 103)	- 7.607 329	112.80 2155		√							Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
2	Jl. Nanas - Lumpang Bolong Kec. Bangil	- 7.608 034	112.79 3611					√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan rambu
3	Jl. Manggis - Lumpang Bolong Kel. Dermo Kec. Bangil (JPL 102)	- 7.606 902	112.79 2056				√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan marka
4	Jl. Rambutan - Desa. Pesanggrahan Kel. Gempeng Kec. Bangil (JPL 101)	- 7.604 348	112.78 8173		√							Terdapat pos jaga dan EWS, perlu pengecatan ulang marka dan penambahan rambu
5	Jl. Durian arah ke Kel. Kolursari Kec. Bangil (JPL 100)	- 7.602 731	112.78 5347		√							Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
6	Jl. Mangga - Penjara Bangil / Pasar Bangil (JPL 99)	- 7.591 398	112.78 0327		√							Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
7	Dusun Pogar / Desa Pogar - Kel. Pogar Kec. Bangil (JPL 97A)	- 7.596 069	112.77 1891			√						Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu
8	Gajah Bendo Kel. Gajah Bendo Kec. Beji (JPL 97)	- 7.595 453	112.76 8837			√						Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu

9	Gajah Bendo Kel. Gajah Bendo Kec. Beji	- 7.595 096	112.76 708									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan
---	--	-------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	(JPL 96)											rambu
10	Dusun Pasinan Desa. Beji Kec. Beji (JPL 95)	- 7.594 728	112.76 5369									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu
11	Dusun Pasinan - Pom Bensin Kec. Beji (Jln Desa Wonokoyo)	- 7.594 056	112.76 2149								√	Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu
12	Yonkav Kec. Beji (JPL 93)	- 7.592 925	112.75 7076									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, perlu penambahan rambu
13	Dusun Kemloko Selatan Kec. Beji (JPL 92)	- 7.591 211	112.74 8413									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu
14	Dusun Cangkring Malang Selatan - Kec. Beji (JPL 91)	- 7.589 319	112.74 0063									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, perlu penambahan rambu
15	Cangkring Malang - Gunungngsir Kec. Beji (JPL 90)	- 7.588 798	112.73 8166									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu, dan pengecatan marka
16	Dusun Kebon Candi - Desa Gunungngsir Kec. Beji (JPL 89)	- 7.587 125	112.73 3028									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu, dan pengecatan marka
17	Dusun Selokambang - Desa Gunungngsir Kec. Beji (JPL 88)	- 7.586 066	112.72 9256									Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu

18	Dusun Gunungngsir - Desa Gunungngsir Kec. Beji (JPL 87)	- 7.584 552	112.72 4019		√						Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan perlu pengecatan marka ulang
19	Dusun Kemrangan Desa Winong Kec. Gempol (JPL 86)	- 7.579 354	112.71 6982			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan

											rambu
20	Dusun Grogolan Desa Winong Kec. Gempol (JPL 85)	- 7.573 14	112.71 2901		√						Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
21	Jl. Nasional Legok - Apollo Kec. Gempol (JPL 85A)	- 7.566 504	112.70 185		√						Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
22	Jl. Tri Buana - Guntner Kec. Gempol (JPL 84)	- 7.556 706	112.70 5928				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, perlu penambahan rambu
23	Dusun Masangan Desa Masangan I Kec. Bangil (Bakso Spoor) (JPL 105)	- 7.604 451	112.80 9065				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, perlu penambahan rambu
24	Desa Blawi Masangan II Kel. Masangan Kec. Bangil (JPL 106)	- 7.604 263	112.81 2349				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu
25	Dusun Blawi Desa Masangan I Kel. Masangan Kec. Bangil (JPL 107)	- 7.604 123	112.81 3211		√						Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu

26	Dusun Balung Bendo Desa Masangan Kec. Bangil (JPL 108)	- 7.602 809	112.81 9655			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
27	Jl. Perikanan Dalwa - Desa Raci Kec. Bangil (JPL 109)	- 7.603 577	112.82 4719			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu dan pengecatan marka
28	Dusun Raci Krajan Desa Raci Kec. Bangil (JPL 111)	- 7.605 843	112.82 991			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
29	Dusun Kampung Baru Desa Raci (JPL	- 7.608 255	112.83 4445			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang

	112)										tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
30	Gerongan - Desa Raci Kec. Kraton (JPL 114)	- 7.614 391	- 7.6143 91			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
31	Depan AURI - Raci Kec. Kraton (JPL 116A)	- 7.616 975	112.85 0433			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS tidak berfungsi
32	Wismokerto - Kec. Kraton (JPL 116B)	- 7.618 617	112.85 3737				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS tidak berfungsi
33	Kramat - Bendungan Kec. Kraton (JPL 117)	- 7.620 189	112.85 6789			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS tidak berfungsi
34	Bendungan - Pulokerto Kec. Kraton (JPL 118)	- 7.621 139	112.85 9322				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS ada yang tidak berfungsi
35	Jl. Stasiun - Desa Semare Kec. Kraton (JPL 121)	- 7.623 015	112.87 9608			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta beberapa rambu perlu penggantian

36	Simpang Jarangan Kec. Rejoso (JPL 141)	- 7.667 553	112.93 7706				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, perlu penambahan rambu, dan EWS tidak berfungsi
37	Kendung Bako Kec. Rejoso	- 7.671 836	112.94 0872					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu
38	Dusun Kasuran - Jembatan Timbang Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso (JPL 143)	- 7.679 002	112.94 9532				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
39	Dusun Palembang - Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso	- 7.681 507	112.95 3377					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
40	Desa Rejoso Lor - Masuk ke	- 7.682 655	112.95 7748				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak

	Kecamatan Rejoso (JPL 144)										berfungsi, dan perlu penambahan rambu
41	Dusun Patuguran Desa Rejoso Lor Kec. Rejoso (JPL 146)	- 7.685 173	112.96 17				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu
42	Desa Kemantren Kec. Rejoso (JPL 147)	- 7.694 885	112.96 1716			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu
43	Dusun Rekesan Desa Arjosari Kec. Rejoso (JPL 149)	- 7.697 22	112.97 6059					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
44	Wates Tani Kec. Nguling (JPL 163)	- 7.718	113.07 7			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu
45	Dusan Sedarum Desa Sedarum Kec. Nguling (JPL 161)	- 7.721 18	113.05 7686					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu penambahan rambu

46	Dusun Slambit - Desa Dandang Gendis Kec. Nguling (JPL 160)	- 7.724 522	113.04 11				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS ada yang tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
47	Dusun Sumberda wesari Kec. Nguling (JPL 159)	- 7.720 585	113.01 7899				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS, dan perlu penambahan rambu
48	Desa Sumur Waru - Semambu ng Ke. Grati (JPL 155)	- 7.710 429	112.99 9336		√						Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu penambahan rambu
49	Dusun Pangkrengan - Desa Sumber Agung Kec. Grati (JPL 152)	- 7.705 054	112.98 9815				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
50	Rombo Karang Panas (JPL 2)	- 7.612 453	112.78 7593				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, perlu pengecatan marka dan penambahan rambu

51	Sumberbot o (JPL 4)	- 7.633 337	112.77 4188				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, perlu pengecatan marka dan penambahan rambu
52	Rombo Wetan (BH12)	- 7.626 101	112.77 8804				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi
53	Dusun Krajan Wonokerto (JPL 6)	- 7.651 32	112.76 3				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
54	Wonokerto Utara (JPL 8)	- 7.657 2	112.75 8493				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan EWS tidak berfungsi
55	Wonokerto Selatan (JPL 9)	- 7.660 189	112.75 6281				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan perlu penambahan rambu

56	Doyong Kendurua n (JPL 10)	- 7.663 577	112.75 3702				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
57	Mengenk Kendurua n (JPL 11)	- 7.673 61	112.74 7869				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS tidak berfungsi, dan perlu penambahan rambu
58	Kalirejo Sukorejo (JPL 16)	- 7.690 946	112.72 9891			√					Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu
59	Pasar Sukorejo (JPL 20)	- 7.717 293	112.72 2932			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka
60	Landi 22 Karangson o (JPL 22)	- 7.727 039	112.72 5822			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka
61	Karangson o (JPL 23)	- 7.730 117	112.72 67				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu
62	Karangson o 24 Nasional (JPL 24)	- 7.734 215	112.72 567			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka

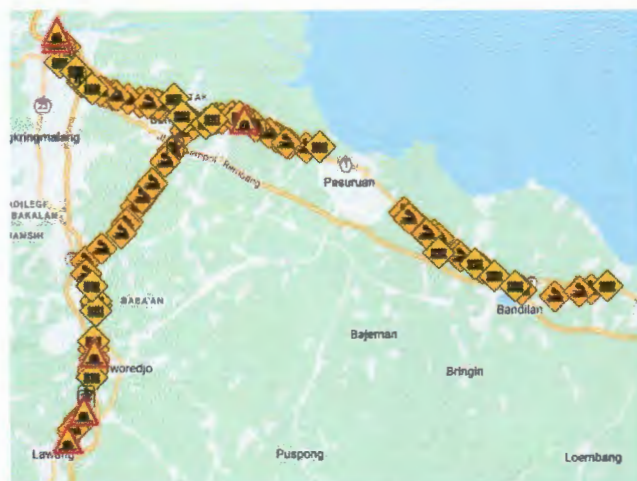
63	Sengon (JPL 25)	- 7.754 347	112.72 4789			√					Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka
64	Yudarta (JPL 26)	- 7.759 788	112.72 483				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu
65	Sekarmojo Timur (JPL 27)	- 7.766 946	112.72 5294				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, EWS, dan perlu penambahan rambu
66	Sekarmojo Barat (JPL 28)	- 7.771 897	112.72 4663				√				Tidak terdapat palang pintu, pos jaga, dan perlu penambahan rambu

67	Tejowangi (JPL 30)	- 7.779 25	112.72 2836		√						Terdapat pos jaga dan early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka
68	Sentul/Ds Gunting (JPL 33)	- 7.807 445	112.71 5202			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu pengecatan marka
69	Dusun Ngawen.Ds Pararejo (JPL 34)	- 7.809 454	112.71 3979			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan pengecatan marka
70	Dusun Ngawen (JPL 35)	- 7.815 462	112.70 9139			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan perlu rambu
71	Rudenim Kec. Bangil (JPL 113)	- 7.609 27	112.83 6			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu rambu serta hanya sebagai akses ke Rudenim dijaga petugas dari Rudenim
72	Latek Kec. Bangil (JPL 104)	- 7.604 92	112.80 6		√						Terdapat pos jaga, early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka dan penambahan rambu
73	Dusun Batoan Desa Tambak Rejo Kecamatan Kraton (JPL 119)	- 7.624 05	112.87 1					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu rambu
74	Watulunyuh Kecamatan Rembang (JPL 5)	- 7.648 01	112.76 5			√					Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi dan perlu pengecatan

											marka
75	Kenduruan Kecamatan Sukorejo (JPL 12)	- 7.675 2	112.74 7					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS dan perlu penambahan rambu
76	Kenduruan Kecamatan Sukorejo (JPL 13)	- 7.681 35	112.74 4					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi dan perlu pengecatan marka

77	Lemahbangan Kecamatan Sukorejo (JPL 18)	- 7.699 78	112.71 9				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, EWS tidak berfungsi
78	Lemahbangan Kecamatan Sukorejo (JPL 19)	- 7.708 68	112.72				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, dan EWS
79	Sentul Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Sentul II)	- 7.813 68	112.71 1					√			Sudah ditutup
80	Sentul Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Sentul I)	- 7.812 97	112.71 2					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS
81	Sekarmoyo Kecamatan Purwosari (JPL 29)	- 7.774 66	112. 724				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Akses ke Makam dan beberapa rumah warga)
82	Arjosari Kecamatan Rejoso (JPL 148)	- 7.695 86	112.97 4				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS
83	Rowo Gempol Kecamatan Lekok (JPL 150)	- 7.702 47	112.98 6			√					Terdapat pos jaga, palang pintu, early warning system (EWS) serta perlu pengecatan marka dan penambahan rambu
84	Sumber Agung Kecamatan Grati	- 7.705 26	112.99 1					√			Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Akses 1 rumah warga)
85	Sumber Agung Kecamatan Grati (JPL 154)	- 7.705 26	112.99 1				√				Sudah ditutup
86	Sumber Agung Kecamatan Grati (JPL 157)	- 7.718 024	113.01 3405			√					Terdapat pos jaga (jadi satu sama stasiun), palang pintu, early warning system hanya alarm, serta perlu pengecatan marka
87	Sedarum Kecamatan Nguling (JPL 162)	- 7.719 62	113.06 6				√				Tidak terdapat pos jaga, palang pintu, rambu dan EWS (Rekomendasi tutup)
88	Bandaran Kecamatan Gempol (BH 152)	- 7,546 31	112,7							√	
89	Gempol Kecamatan Gempol (BH 154)	- 7,550 19	112,7							√	

90	Gempol Kecamatan Gempol (Fly Over Toll)	- 7,557 06	112,70 7						√			
91	Grogolan Kecamatan Gempol (Fly Over Toll)	- 7,574 76	112,71 4						√			
92	Raci Kecamatan Bangil	7,605	112,82 8							√		
93	Raci Kecamatan Bangil (BH 236)	- 7,610 29	112,83 8						√		Overpa ss	
94	Oro Oro Ombo Wetan Kecamatan Rembang	- 7,622 82	112,78 1						√			
95	Pandean Kecamatan Purwosari	- 7,761 73	112,72 5							√		
96	Semambu ng Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Semambu ng)	- 7,789 9	112,72						√			
97	Gajahrejo Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Gajahrejo)	- 7,793 55	112,72						√			
98	Parerejo Kecamatan Purwodadi (Jl. Desa Parerejo)	- 7,801 16	112,71 8							√		
99	Sentul Kecamatan Purwodadi	- 7,820 25	112,70 7							√		



Gambar 1 Peta Perlintasan Kereta Api di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Tabel 2.2.B

Data Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Jumlah (unit)
1	Delineator	150
2	PJU	743
3	Rambu	45
4	RPPJ	17

5	Paku Jalan	415
6	Marka	9
7	Cermin Tikung	14
8	Guard Rail	3
9	Warning Light	5
10	Lampu Tematik	3
Total		1.404



Gambar 2 Peta Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun Anggaran 2022

DATA TRAYEK AKTIF ANGKUTAN UMUM
SAMPAI BULAN DESEMBER 2022

NOMOR	KODE TRAYEK	JURUSAN	JUMLAH BENDARAAN
			2022
1	101	TERMINAL PANDAAN - PRIGEN - TRETES PP	9
2	102	PSR GEMPOL - GD LEGI - SUB TERM BANGIL PP	
3	103	TERMINAL PANDAAN - BAUJENG - SUB TERMINAL BANGIL PP	
4	104	PSR PURWODADI - CONWEK - NONGKOUAJAR PP	2
5	105	SUB TERM BANGIL - PSR - SUKOREJO PP	
6	106	SUB TERM BANGIL - REMBANG - SUB TERM WONOREJO, PP	
7	107	TERMINAL PANDAAN - CARAT - GEMPOL - PP	1
8	108	TERMINAL PANDAAN - GUNUNG GANSIR - GD LEGI PP	
9	109	PSR PURWOSARI - WRATI - SUB TERMINAL WONOREJO PP	
10	110	PSR WARUNGOWO - NGEMPIT - KRATON PP	
11	111	TERM. PANDAAN - JETAK - DAYUREJO	9
12	112	TERM. PANDAAN - PSR SUKOREJO PP	
13	113	SUB TERMINAL WONOREJO - WRATI - TUTUR PP	
14	114	SUB TERMINAL BANGIL - PSR KALIANYAR PP	4
15	115	BANYU BIRU - NGOPAK - SAMBIREJO PP	2
16	116	BANYU BIRU - WINONGAN - PENATAAN - SAMBIREJO PP	
17	117	PSR NGOPAK - WINONGAN - UMBULAN PP	
18	118	PURWOSARI - TEJOWANGI - GN MALANG PP	
19	119	SUB TERM WONOREJO - JATI GUNTING - PSR SUKOREJO PP	
20	120	SUB TERM BANGIL - GN GANGSIR - KEJAPANAN PP	
21	121	PSR KRATON - SUB TERM BANGIL - PSR GEMPOL PP	15
22	122	PSR PASREPAN - WATESTANI - SUB TERM NGULUNG	
23	123	PSR SUKOREJO - DAYUREJO - PRIGEN PP	
24	124	LEKOK - GETUKJATI - NGOPAK - JARANGAN PP	
25	125	TERMINAL PANDAAN - GOMOH - TAMAN SAFARI PP	3
26	126	PSR PURWOSARI - GROGO PP	
27	127	PSR PASREPAN - TOSARI PP	1
28	128	PSR WARUNGOWO - SUB TERM WONOREJO - PURWODADI PP	2
29	129	PSR PASREPAN - SUMBERPITU - TUTUR PP	
30	130	SUB TERM NGULUNG - GRATI - JARANGAN PP	
31	131	PSR PURWODADI - TERM PANDAAN - GEMPOL PP	5
32	132	TERM PANDAAN - PRIGEN - LUMBANGREJO	2
33	133	TERM PANDAAN - SUKORENO - SEKARUJOHO PP	2
Jumlah			57

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan untuk kebutuhan trayek angkutan sebanyak 33 trayek, trayek yang telah aktif beroperasi sebanyak 13 trayek dengan jumlah armada 57 unit

Gambar 3 Data Trayek Angkutan Umum

DAFTAR KENDARAAN LULUS UJI
TAHUN 2022

NO.	BULAN	MOBIL PERSEMPING		MOBIL LULUS				MOBIL BARU				KENDARAAN KHUSUS		KERETA GANDONGAN		KERETA TERPELAN		JUMLAH
		UMUM		UMUM		TIDAK UMUM		UMUM		TIDAK UMUM		UMUM	TU	UMUM	TU	UMUM	TU	
		JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	JRS	
		< 3000	> 3000	< 3000	> 3000	< 3000	> 3000	< 3000	> 3000	< 3000	> 3000	< 3000	> 3000	< 5000	> 5000	< 5000	> 5000	
Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.				
1	JANUARI			32	48		44		221	1.184	283				2	1		1.253
2	FEBRUARI			2	41		29		181	372	214				3	2		1.343
3	MARET			14	40		33		173	963	209				5	1	4	1.390
4	APRIL			22	61		37		104	592	138					7		830
5	MAY			9	23		9		84	383	84					4	1	559
6	JUNI			55	57		43		240	1.178	349				2		4	1.579
7	JULI			21	41		16		212	1.028	361						3	1.756
8	AUGUSTUS			8	35		25		140	943	225				1	1	3	1.402
9	SEPTEMBER			11	65		34		197	617	207				2		10	1.353
10	OKTOBER			26	43		35		114	871	141					4		990
11	NOPEMBER			5	31		18		58	360	95					6	3	582
12	DESEMBER	2		42	61		38		227	977	323						9	1.683
	SUMAH	2		341	647		376		1.843	9.419	3.779			2	10	29	34	15.645

Gambar 4 Daftar Kendaraan Lulus Uji Tahun 2022

Adapun *updating data* dari prasarana dan perlengkapan jalan selanjutnya akan disampaikan pada Review Renja 2024 dimana kajian Rencana Induk LLAJ, Evaluasi Jaringan Trayek, dan Inventarisasi Penerangan Jalan Umum akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel T-C.30 / Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	IKU (Tujuan & Sasaran) P-Renstra 2018-2023											
	Tujuan : Indeks Konektivitas Wilayah			13,04	13,92			12,04				Perlu adanya evaluasi jaringan trayek agar konektivitas wilayah dapat tercapai
	Sasaran : Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum			13,04	13,92			12,04				Perlu adanya evaluasi jaringan trayek agar konektivitas wilayah dapat tercapai
	Persentase angkutan umum yang laik jalan			100	100			100				Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan pengadaan alat uji serta pemeliharaan rutin
	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah			83	83,99			83,99				Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan pengadaan alat uji serta pemeliharaan rutin
2	IKU (Tujuan & Sasaran) Renstra 2024-2026											

	Tujuan : Indeks Infrastruktur					0,73	0,76			0,73	0,76	
	Perhubungan											
	Sasaran : Meningkatkan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum					54,50%	60,60%			54,50%	60,60%	
	Meningkatnya prasarana perhubungan					67,00%	68,00%			67,00%	68,00%	
	Meningkatnya pelayanan transportasi yang berkeselamatan					-3,10%	-3,20%			-3,10%	-3,20%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah					84	84,4			84	84,4	
	Indikator SPM											
3	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota (Σ Jaringan Jalan Kabupaten terlayani@angkutan umum)/(Σ Total Jaringan Jalan Kabupaten) x 100%)					9,3	9,6			9,3	9,6	
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (= Σ Tersedianya halte pada setiap Kabupaten)/(Σ Total Kebutuhan Halte pada Suatu Kabupaten) x 100%)					92	93			92	93	
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten / Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (Σ Jumlah Terminal Penumpang)/(Σ Jumlah jaringan pelayanan AKDP dan angkutan pedesaan)					2	2,1			2	2,1	

		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten / Kota			86	88			86	88	
		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten / Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji			22	43			22	43	
		Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota			100%	100%			100%	100%	
4			IKK								
			Rasio Konektivitas Kabupaten		58	58			58	58	
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		0,36	0,36			0,36	0,36	
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C		53,66	53,66			53,66	53,66	
			Terlaksananya pelayanan uji berkala		99,7	99,7			99,7	99,7	
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten		86	86,5			86	86,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya. Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang tersaji pada Tabel 2.2, dapat dilihat bahwa Indeks Konektivitas Wilayah yang merupakan Indikator Tujuan tercapai sebesar 92 %. Sasaran meningkatnya wilayah yang terkoneksi angkutan umum yang berkeselamatan tercapai di 1 (satu) indikator, yaitu prosentase angkutan umum yang laik jalan, sedangkan indikator sasaran persentase wilayah (desa) yang terkoneksi sarana angkutan umum memiliki tingkat capaian sebesar 92 %.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tersebut berpengaruh terhadap pencapaian Misi ke - 3 Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 yang berbunyi "Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan". Dengan pencapaian kinerja Indeks Konektivitas Wilayah yang mencapai 92 %, hal ini berdampak positif pada tingkat konektivitas wilayah di Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan daya saing dan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana pada *goals* ke 11 yang berbunyi "Make cities and human

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”, pencapaian kinerja pada indikator Indeks Konektivitas Wilayah belum berdampak signifikan terhadap *goals* tersebut sehingga diperlukan upaya lanjutan dan kerjasama antar pihak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada pencapaian level Nasional, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 yang berbunyi “Terwujudnya Konektivitas Nasional”, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memiliki realisasi konektivitas dengan capaian 92 % di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kemudian terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2011, indikator Indeks Konektivitas Wilayah tidak sama dengan indikator pada SPM tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaian SPM dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berikut penjelasan terkait permasalahan dan hambatan pada Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan pembagian urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Rencana induk jaringan LLAJ adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat informasi tentang kondisi jalan, kebutuhan transportasi, serta rencana kegiatan untuk mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten/Kota. Penetapan Rencana induk jaringan LLAJ penting untuk memastikan tercapainya mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien serta dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan penyusunan dokumen Tataran Transportasi Lokal pada Tahun 2014 dan akan diperbarui melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ di Tahun Anggaran 2023. Dokumen pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ perlu sinergitas antar OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta perlu dituangkan ke dalam peraturan daerah atau bupati.

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25, perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan efisiensi penggunaan anggaran yang didapat dari APBD dan DBHCHT untuk membangun perlengkapan jalan sesuai prioritas, dimana anggaran yang didapat dari APBD belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan.

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Terminal penumpang merupakan bagian dari simpul transportasi yang diperuntukkan bagi pergantian penumpang secara antarmoda dan intermoda yang dikelompokkan menjadi terminal Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.

Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Pasuruan saat ini yang beroperasi hanya di Terminal Pasrepan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sesuai fungsi dari terminal itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih perlunya upaya pengaturan terhadap agar angkutan umum yang ada untuk masuk ke dalam terminal. Selain itu, perlu ada sinergitas antar instansi, seperti Dinas Pariwisata atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuat Terminal Pasrepan memiliki daya tarik wisata agar wisatawan yang menuju Bromo dapat berkunjung ke Terminal Pasrepan.

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Penyediaan fasilitas parkir dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan dan di dalam Ruang Milik Jalan yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, terdapat fasilitas parkir berupa terminal parkir khusus di Kecamatan Beji dan Kecamatan Wonorejo. Selain itu, terdapat titik parkir yang dilayani oleh Juru Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebanyak 170 titik dimana retribusi parkir diatur dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2022 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pasuruan.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah proses pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan lingkungan. Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan komponen kendaraan, seperti rem, ban, kelistrikan, lampu, emisi gas buang, dan lain-lain. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor dapat berfungsi dengan baik, aman, dan ramah lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 53, uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pengujian dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem yang terkoneksi dengan database Kementerian Perhubungan, serta meningkatkan sistem pembayaran secara *cashless*.

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah suatu konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan dan transportasi secara keseluruhan. Konsep ini melibatkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan jalan dan transportasi, seperti pengaturan lalu lintas, penerapan sistem transportasi cerdas, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui pembangunan CCTV yang terintegrasi dengan *Pasuruan Transport Center* sehingga monitoring lalu lintas dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu,

terdapat petugas lapangan yang bertugas dalam membantu Kepolisian dalam mengatur lalu lintas pada jam – jam sibuk atau saat terjadi kemacetan di ruas – ruas jalan yang bermasalah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih membutuhkan pembangunan CCTV yang saat ini belum merata terbangun di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.

7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota

Analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu proyek pembangunan terhadap sistem transportasi dan lalu lintas. Jika hasil analisis dampak lalu lintas menunjukkan bahwa proyek tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi lalu lintas, maka perlu dilakukan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan beserta stakeholder terkait perlu melakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas yang harus dilaksanakan oleh pengembang sehingga kelancaran lalu lintas di sekitar pembangunan dapat tercapai.

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota Audit Keselamatan LLAJ adalah evaluasi terhadap perencanaan atau perubahan yang diusulkan pada jalan dan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan tersebut memenuhi standar keselamatan LLAJ yang telah ditetapkan dan memperbaiki masalah keselamatan yang terjadi di jalan yang sudah ada. Sedangkan inspeksi keselamatan LLAJ adalah evaluasi terhadap kondisi jalan dan lalu lintas yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah keselamatan LLAJ yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Audit keselamatan LLAJ membantu memastikan bahwa perencanaan atau perubahan yang diusulkan memenuhi standar keselamatan LLAJ, sementara inspeksi keselamatan LLAJ membantu memastikan bahwa kondisi jalan dan lalu lintas yang sudah ada memenuhi standar keselamatan LLAJ dan mengidentifikasi masalah keselamatan yang perlu diperbaiki.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berupaya dalam memenuhi keselamatan lalu lintas bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui pembangunan perlengkapan jalan yang berkualitas, khususnya di

perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Pasuruan sebanyak 99 perlintasan kereta api dengan rincian 20 perlintasan dengan palang pintu, 12 perlintasan tidak sebidang, dan 67 perlintasan tanpa palang pintu. Perlintasan tanpa palang pintu ini mendapatkan perhatian khusus untuk dibangun palang pintu serta penjagaannya. Kemudian perlintasan tanpa palang pintu yang sifatnya liar, perlu untuk ditutup setelah dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. Selain itu, pemeriksaan kendaraan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor dan *ramp check* rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar menjamin keselamatan kendaraan sesuai standar.

Dalam melaksanakan tugas terkait keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan masih memerlukan sumber daya manusia yang berkompetensi terhadap audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas.

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Penyediaan angkutan umum merupakan kegiatan prioritas dalam rangka memenuhi target pada indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Untuk menjalankan tugas tersebut, terdapat berbagai hambatan baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum dikarenakan berbagai hal, seperti kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi, jarak pemukiman yang semakin jauh dari pusat kegiatan, kondisi angkutan umum yang tidak layak, angkutan *ngetem*, dan sebagainya. Dari sisi internal, manajemen angkutan umum masih belum memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum dikarenakan operator angkutan belum tergabung dalam satu manajemen. Perlu upaya seperti sosialisasi dan pembuatan peraturan yang mengatur terkait pembuatan manajemen tersebut.

10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik di wilayah perkotaan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi daerah - daerah yang membutuhkan layanan angkutan perkotaan, sehingga dapat diberikan pelayanan angkutan publik yang optimal dan terintegrasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / kota

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan merupakan salah satu instrumen perencanaan dalam penyediaan pelayanan transportasi perkotaan. Penetapan ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan memantau sistem transportasi perkotaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu, dapat berfungsi menjadi dasar dalam penetapan trayek angkutan umum yang dapat memberikan pelayanan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan aman bagi masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

12. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten / kota

Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten/kota dilakukand engan tujuan untuk memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau dan terintegrasi bagi masyarakat di pedesaan. Rencana umum jaringan trayek pedesaan merupakan instrumen perencanaan transportasi yang menjadi dasar untuk menentukan rute dan trayek angkutan umum di wilayah pedesaan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan masih perlu untuk menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ yang turunannya dapat dibuat dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, rencana umum jaringan trayek perkotaan, dan rencana umum jaringan trayek pedesaan.

13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 152, angkutan taksi merupakan bagian dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan *startup* yang menyediakan jasa angkutan secara daring, perlu adanya pengelolaan angkutan daring yang dapat dikategorikan sebagai angkutan tidak dalam trayek. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pendataan bagi para mitra jasa angkutan daring.

14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota

Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan transportasi umum. Tarif yang ditetapkan haruslah wajar dan terjangkau bagi masyarakat, namun juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha penyedia jasa angkutan umum. Penetapan tarif kelas ekonomi ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Pasuruan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam menjawab permasalahan dan hambatan di bab sebelumnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan transportasi secara makro yang berupa Rencana Induk Jaringan LLAJ, dan turunan perencanaan transportasi angkutan umum secara mikro yang berupa rencana umum jaringan trayek perkotaan, rencana umum jaringan trayek pedesaan, dan penetapan kawasan perkotaan. Selain itu, dari Rencana Induk Jaringan LLAJ dapat diambil suatu kebijakan transportasi yang menyangkut pembangunan prasarana LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan fasilitas parkir, dan keselamatan transportasi.
2. Peningkatan manajemen pengelolaan data yang valid, akuntabel dan rutin diperbarui. Dalam menunjang perencanaan transportasi yang baik, diperlukan data – data pendukung dikumpulkan dan dikurasi secara baik. Berkembangnya teknologi informasi memungkinkan data – data ini untuk digabungkan ke dalam satu data yang terpusat, dimana data ini dapat divisualisasikan berupa *dashboard*.
3. Perlu adanya pendekatan kepada operator trayek angkutan umum berupa kegiatan sosialisasi atau bimbingan, yang selanjutnya dapat diarahkan untuk menggabungkan setiap operator trayek angkutan umum ke dalam satu manajemen berupa BUMD yang mengintegrasikan sistem tiket dan pengolahan big data pengguna transportasi. Selain itu, pengawasan Standar Pelayanan Minimal lebih dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat beralih ke angkutan umum.
4. Dalam mengatasi keterbatasan anggaran dari APBD, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu untuk mencari tambahan penganggaran dari sumber lain, seperti DAK, DBHCHT, BKK, dan CSR. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan membutuhkan pelayanan perhubungan yang baik.
5. Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas sehingga diperlukan penambahan

SDM. Saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam melaksanakan pola pembibitan SDM. Selain itu, perlu ditambah dengan Perguruan Tinggi lain seperti Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan untuk menambah SDM terkait keselamatan jalan yang menjadi salah satu prioritas tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

2.3.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil analisa dari kinerja pelayanan daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dapat diambil isu – isu penting sebagai berikut :

1. Peningkatan konektivitas wilayah

Peningkatan konektivitas wilayah merujuk pada upaya meningkatkan aksesibilitas antara satu wilayah dengan wilayah lain melalui infrastruktur transportasi yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan akses ke transportasi publik, perbaikan manajemen transportasi publik, dan pembangunan simpul transportasi berupa terminal tipe C yang sesuai kebutuhan.

2. Peningkatan keselamatan lalu lintas

Peningkatan keselamatan lalu lintas adalah upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di jalan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman bagi pengguna jalan. Kebijakan yang dapat diambil adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pemasangan perlengkapan jalan yang dipasang di daerah rawan kecelakaan, pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilakukan secara rutin dan berkala, dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018–2023 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perhubungan berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2022.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/Sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dinas Perhubungan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel T-C.31. / Tabel 2.3

Pada tabel ini menunjukkan adanya kenaikan yang terjadi di beberapa sub kegiatan fisik. Hal ini dikarenakan adanya usulan kecamatan, usulan dinas dan pokir. Selain itu, kenaikan yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran karena menyesuaikan pada pedoman pelaksanaan APBD dan standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Tabel T-C.31 / 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				79.228.000.000	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				79.828.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	45.063.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	44.763.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 dokumen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 dokumen		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	26.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	26.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	20.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	35.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 orang/bulan	9.600.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	960 orang/bulan	9.300.000.000	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71 orang/bulan	1.700.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71 orang/bulan	1.700.000.000	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 kegiatan	55.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 kegiatan	55.000.000	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan		

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	10.000.000	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen		

14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 unit	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 unit	50.000.000	
18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 kegiatan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 kegiatan		

19	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	5.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	5.000.000
20	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	5.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	
21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang		

		gan	Milik Daerah SKPD				gan	Milik Daerah SKPD		
22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	
23	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
24	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150 unit	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150 unit	100.000.000
25	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 kegiatan	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 kegiatan	5.000.000
27	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 laporan	15.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 laporan	15.000.000

28	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
29	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			Pemindahan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		
30	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	50.000.000

31	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	30.000.000
32	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50.000.000
33	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	11 kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	11 kegiatan	
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 unit	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 unit	40.000.000
36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 unit	30.000.000

37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 jenis	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 jenis	15.000.000	
38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 jenis	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 jenis	30.000.000	
39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 jenis	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 jenis	50.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 unit		Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 unit		
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1400 orang	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1400 orang	80.000.000	
41	Penyelenggaraan	Dinas	Jumlah Laporan	12 bulan		Penyelenggaraan	Dinas	Jumlah Laporan	12 bulan		

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perhubungan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		280.000.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perhubungan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		280.000.000	
42	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen		
43	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 kegiatan		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 kegiatan		
44	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%		

45	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	300.000.000	
46	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	50.000.000	
47	Pengadaan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1.200.000.000	Pengadaan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1.200.000.000	
48	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	150.000.000	
49	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit		
50	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit		

51	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			
52	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	150.000.000	
53	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	

54	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%		
55	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.000.000	
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30.000.000.000	
57	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporn	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporn	20.000.000	
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	65.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	65.000.000	
59	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 unit	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	30.000.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit		
60	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit		
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80 unit	100.000.000	

	Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			

63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinas Perhubungan	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinas Perhubungan	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum	56%	1.525.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum	56%	1.225.000.000	
			Prosentase Kendaraan yang di uji	90%	1.935.000.000			Prosentase Kendaraan yang di uji	90%	1.935.000.000	
			Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia	65%	7.250.000.000			Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia	65%	7.250.000.000	
			Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	72%	18.960.000.000			Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	72%	20.160.000.000	
		65		Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ	60%		4.495.000.000		Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ	60%	4.495.000.000
66	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi	5 dokumen	4.350.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi	5 dokumen	4.350.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	800.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 dokumen	800.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
67	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ	3 laporan	3.500.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ	3 laporan	3.500.000.000	

	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota			
68	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan	8010 unit	18.100.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan	8010 unit	19.300.000.000	DBHCHT, DAU
69	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 unit	300.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 unit	3.500.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
70	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	800 unit	14.000.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	800 unit	12.000.000.000	Pokir, DAU, DBHCHT (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP)
71	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	200.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7200 unit	3.600.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7200 unit	3.600.000.000	DBHCHT, DAU (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan

											Pariwisata AATP)
72	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya pengelolaan terminal	1 terminal	700.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Terlaksananya pengelolaan terminal	1 terminal	700.000.000	
73	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	100.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
	Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 gedung	300.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 gedung	300.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
74	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	25 unit	150.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	25 unit	150.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
75	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 lokasi	150.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 lokasi	150.000.000	
76	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya			

77	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir	170 wilayah	6.550.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir	170 wilayah	6.550.000.000	
----	-------------------------------------	--------------------	--	-------------	---------------	-------------------------------------	--------------------	--	-------------	---------------	--

	Pembangunan Fasilitas Parkir					Pembangunan Fasilitas Parkir					
78	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 dokumen	6.500.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 dokumen	6.500.000.000	pokir, DAU (Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP)
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	
80	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	presentase kendaraan lulus uji	94%	1.935.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	presentase kendaraan lulus uji	94%	1.935.000.000	
81	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	800.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	800.000.000	
82	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	80.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	80.000.000	

83	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	7500 Unit	200.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	7500 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	16400 Dokumen	550.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	16400 Dokumen	550.000.000	

	Berkala Kendaraan Bermotor	Pasuruan	Berkala Kendaraan Bermotor			Berkala Kendaraan Bermotor	Pasuruan	Berkala Kendaraan Bermotor			
84	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	
85	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	20.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	20.000.000	pokir
86	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	150.000.000	
87	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	35.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	35.000.000	
88	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	15.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	15.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	35.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	35.000.000	

89	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 kegiatan	680.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	12 kegiatan	680.000.000	
90	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
91	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 unit	150.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 unit	150.000.000	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
92	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	30.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	30.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24 laporan	300.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24 laporan	300.000.000	

93	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 kegiatan	150.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 kegiatan	150.000.000
99	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen andalalin yang ditetapkan	22 dokumen	180.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen andalalin yang ditetapkan	22 dokumen	180.000.000
100	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	22 dokumen	30.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	22 dokumen	30.000.000
101	Peningkatan Kapasitas Penilai	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penilai Andalalin yang	3 orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penilai Andalalin yang	3 orang	40.000.000

	Andalalin	Pasuruan	Ditingkatkan Kapasitasnya			Andalalin	Pasuruan	Ditingkatkan Kapasitasnya		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 laporan	30.000.000
102	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	80.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	80.000.000
103	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ	7 dokumen	145.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ	7 dokumen	145.000.000
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	15.000.000

104	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	10.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	10.000.000	
105	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 laporan	20.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 laporan	20.000.000	
106	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 laporan	50.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 laporan	50.000.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 laporan	50.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 laporan	50.000.000	
10	Penyediaan	Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum	195		Penyediaan	Kabupaten	Jumlah Angkutan Umum	195		
7	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n Pasuruan	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	armada	850.000.000	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	n Pasuruan	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	armada	550.000.000	
108	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	195 armada	800.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	195 armada	500.000.000	Pokir, DBHCHT, DAU (mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pembangunan

											Kawasan Pariwisata AATP dan Penataan Kota Bangil)
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000	
11 1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan	1 trayek	210.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan	1 trayek	210.000.000	
11 2	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	

11 3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	
11 4	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	1 trayek	180.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	1 trayek	180.000.000	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	
11 5	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000	
11 6	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi	1 wilayah	110.000.000	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi	1 wilayah	110.000.000	

11 7	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	80.000.000	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 sosialisasi	30.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 sosialisasi	30.000.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	55 izin	65.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	55 izin	65.000.000	Nota Dinas Telah turun ke Anggaran

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 laporan	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	12 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	12 laporan	15.000.000	
	dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan	1 izin	40.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang di terbitkan	1 izin	40.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	30.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	10.000.000	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek	1 dokumen	70.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek	1 dokumen	70.000.000	
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi	1 dokumen	50.000.000	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi	1 dokumen	50.000.000	
Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pasuruan	Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD terkait hasil maupun pengajuan Musrenbang Kabupaten, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya data tersebut disajikan pada Tabel TC.32. / Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan beroperasi sesuai kebutuhan		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara		
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di daerah dengan kondisi penerangan minim yang sebelumnya belum terbangun PJU di ruas jalan kabupaten berdasarkan SK Bupati No. 950 / 397 / 424.014 / 2017 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Pasuruan	Bangil			
		Beji			
		Gempol			
		Kraton			
		Pandaan			

		Pohjentrek			
		Prigen			
		Rembang			
		Kejayan			
		Purwodadi			
		Purwosari			

		Puspo			
		Sukorejo			
		Tosari			
		Tutur			
		Wonorejo			
		Gondangwetan			
		Grati			
		Lekok			
		Lumbang			
		Nguling			
		Pasrepan			
		Rejoso			
		Winongan			
	Pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) di jalan yang sebelumnya tidak ada guardrail	Beji			
		Prigen			
		Purwodadi			
	Pengadaan dan pemasangan cermin tikung pada tikungan tajam atau persimpangan yang sebelumnya tidak ada cermin tikung	Gempol			
		Pohjentrek			
		Prigen			
		Purwosari			
		Puspo			
		Wonorejo			
		Grati			
		Pasrepan			
	Pengadaan dan pemasangan Warning Light (Lampu Peringatan / Hati - hati) di ruas jalan yang belum terbangun warning light	Gempol			
		Rembang			
		Gondangwetan			
	Pengadaan perlengkapan jalan portable (Traffic Cone/kerucut, Traffic Barrier/Pembatas Jalan) bagi kawasan yang membutuhkan alat pendukung rekayasa lalu lintas	Pohjentrek			
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan

					Pariwisata AATP
	Pengecatan marka Zona Selamat Sekolah di ruas jalan yang terdapat sekolah untuk mendukung keselamatan terhadap anak sekolah yang menyeberang jalan di depan sekolah	Bangil			
		Pohjentrek			
	Penanganan/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan kondisi rusak	Beji			
		Gempol			
		Kraton			
		Pandaan			
		Pohjentrek			
		Kejayan			
		Lekok			
		Nguling			
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan		Jumlah prasarana jalan yang terbangun		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP
	Pembangunan Pos Jaga dan Palang pintu Kreta Api di perlintasan sebidang	Beji			
		Gempol			
		Rembang			
		Purwodadi			
		Purwosari			
		Sukorejo			
		Grati			
		Nguling			
		Rejoso			
		Bangil			
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		Mendukung Proyek Strategis Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Penataan Kota Bangil dan Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP

	Penyelenggaraan Angkutan Wisata untuk menghubungkan obyek wisata yang belum terlayani angkutan	Sukorejo			
Total					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan atau program. Sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan. Setiap perangkat daerah pasti memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan dan sasaran juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dalam pembangunan sector transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Kebijakan dan strategis disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005 – 2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sector transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran diatas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

Dalam mendukung visi Presiden RI **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang dilaksanakan dengan 9 (Sembilan) misi meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai upaya pencapaian misi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN-1);
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan (PN-2);
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN-3);
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4);
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5);
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN-6);
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public (PN-7).

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Selanjutnya, agenda pembangunan nasional PN-5 dijabarkan dalam 5 (lima) Program Prioritas, yaitu :

1. PP - Infrastruktur Pelayanan Dasar
2. PP – Infrastruktur Ekonomi
3. PP – Infrastruktur Perkotaan
4. PP – Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
5. PP – Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1, PP 2 dan PP 3 melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut :

1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1)
2. KP – Konektivitas Transportasi Jalan (PP 2)
3. KP – Konektivitas Transportasi Kereta Api (PP 2)

4. KP – Konektivitas Transportasi Laut (PP 2)
5. KP – Konektivitas Transportasi Udara (PP 2)
6. KP – Konektivitas Transportasi Darat (PP 2)
7. KP – Sistem Angkutan Massal Umum Perkotaan (PP 3)

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya, meliputi :

1. Sasaran strategis : Terwujudnya konektivitas nasional, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Penguatan jaringan transportasi eksisting
 - b. Perluasan jaringan layanan transportasi
 - c. Penguatan transportasi antar moda dan multi moda
 - d. Penerapan *Traffic Demand Management* pada semua layanan transportasi
 - e. Mengoptimalkan pendistribusian barang di seluruh wilayah Indonesia
 - f. Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN dan KI
 - g. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local
2. Sasaran strategis : Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Mengoptimalkan SDM pelayanan sarana dan prasarana
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan
 - c. Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel dan lansia
 - d. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana
 - e. Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan pada semua jasa layanan transportasi
3. Sasaran strategis : Meningkatnya keselamatan transportasi, dengan penetapan arah kebijakan :
 - a. Meratifikasi semua peraturan internasional tentang keselamatan dan keamanan pelayaran dan penerbangan
 - b. Penegakan hukum

- c. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan
- d. Pembatasan usia sarana dan prasarana transportasi
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
- f. Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi
- g. Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi
- h. Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan
- i. Edukasi keselamatan transportasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan perlu untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten pasuruan dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peraturan ini dibahas terkait jenis pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. Jaringan pelayanan angkutan jalan, yang memiliki definisi operasional tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota. Target pencapaian standar pelayanan minimal adalah 75 % yang perlu dicapai pada Tahun 2014.
2. Jaringan prasarana angkutan jalan (halte), yang memiliki definisi operasional tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan yang merupakan persentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota. Target pencapaiannya sebesar 100 % pada tahun 2014, dimana seluruh titik kebutuhan halte dapat terpenuhi semua.

3. Jaringan prasarana angkutan jalan (terminal), yang memiliki definisi operasional tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Target pencapaian pada tahun 2014 sebesar 40 %.
4. Fasilitas perlengkapan jalan, yang memiliki definisi operasional tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota yang merupakan persentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota. Target pencapaiannya sebesar 40% di tahun 2014.
5. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor , yang memiliki definisi operasional tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji. Target pencapaiannya sebesar 60 % di tahun 2014.
6. Keselamatan, yang memiliki definisi operasional terpenuhinya standar keselamatan yang merupakan persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota. Target pencapaian pada Tahun 2014 adalah 100 %.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, meliputi :

1. Tujuan

Tujuan adalah sebuah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu perencanaan. Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi untuk mencapai kondisi yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah **“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan”** dengan indikator **“Indeks Infrastruktur Perhubungan”**.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu (3) tahun ke depan. Sasaran Dinas Perhubungan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan, berupa hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Terdapat 3 (tiga) rumusan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, meliputi :

- A. Meningkatkan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum
- B. Meningkatkan Jaringan Prasarana Perhubungan
- C. Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan
- D. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

6.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.3.1. Faktor – faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dimana terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
3. Tujuan 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

Berdasarkan tujuan tersebut, arah kebijakan di Tahun 2024 adalah :

“PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Arah kebijakan tersebut merupakan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dan upaya menjawab isu strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mendapatkan amanah untuk pelaksanaan Tujuan Daerah ke-1 (satu) dengan sasaran tujuan “Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah”.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK) yang merupakan aturan terkait Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. RUNK disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's*). Perpres ini menjadi acuan oleh Dinas Perhubungan dalam memprioritaskan kegiatan yang mendukung keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

6.3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan tujuan pembangunan daerah yang diampu, maka ditetapkan tujuan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan” yang dilaksanakan dengan 1 program prioritas 15 kegiatan dan 1 program penunjang 8 kegiatan meliputi :

1. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

- f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
- g. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- i. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal
 - 2) Pembangunan Gedung Terminal
 - 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas

Utama dan Pendukung)

- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal
- j. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
- k. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota
 - 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
 - 5) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- l. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - 2) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil
 - 4) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- m. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- n. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- 1) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ
- 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 5) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

o. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 8) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 9) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan

RKA-SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribur Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Kepegawaian

- 4) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Lapangan

- 3) Pengadaan Alat Besar
- 4) Pengadaan Mebel
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 6) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Mebel
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kerja perangkat daerah harus didasarkan pada visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rencana kerja ini harus juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang menjadi target pelayanan. Dalam penyusunan rencana kerja, perangkat daerah harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang ada. Pendanaan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pelayanan publik. Pendanaan dapat berasal dari anggaran pemerintah daerah, dana hibah, sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan lain sebagainya. Penting bagi perangkat daerah untuk memastikan bahwa pendanaan yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung proyek strategis Kabupaten Pasuruan yang meliputi Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata Arjuna Agro Technopark (AATP) dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

Dalam mengelola pendanaan, perangkat daerah juga harus mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkait ketergantungan pada satu sumber pendanaan saja. Diversifikasi sumber pendanaan dapat dilakukan dengan mencari dana hibah dari pihak ketiga atau mengembangkan sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan PAD. Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024, disajikan pada **Tabel T-C.33 / Tabel 4**.

Tabel T-C.33 / Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				79.408.000.000			100%	87.343.200.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi		100%	45.063.000.000	APBD		100%	49.563.700.000
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dinas Perhubungan	9 dokumen	112.000.000	APBD		9 dokumen	117.600.000
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	2 dokumen	22.000.000	APBD		2 dokumen	23.100.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dinas Perhubungan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000

2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Dinas Perhubungan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.250.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	6 laporan	30.000.000	APBD		6 laporan	31.500.000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	3 laporan	40.000.000	APBD		3 laporan	42.000.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Dinas Perhubungan	12 laporan	10.842.000.000			12 laporan	11.926.200.000
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	960 orang/bulan	9.100.000.000	APBD		1020 orang/bulan	10.010.000.000
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	12 dokumen	1.680.000.000	APBD		12 dokumen	1.764.000.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	12 dokumen	45.000.000			12 dokumen	47.250.000
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan			APBD			-

2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	1 laporan	10.000.000			1 laporan	10.500.000
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Perhubungan	250 dokumen	5.000.000	APBD		250 dokumen	5.250.000
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	12 laporan	2.000.000			12 laporan	2.100.000
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan			APBD			-
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	100%	68.000.000	APBD		100%	74.800.000
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	1 dokumen	2.000.000			1 dokumen	2.200.000
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	12 dokumen	47.000.000			12 dokumen	51.700.000
2.15.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	4 laporan	2.000.000			4 laporan	2.200.000
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	2 laporan	5.000.000	APBD		2 laporan	5.500.000

2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	4 laporan	5.000.000	APBD	4 laporan	5.500.000
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	4 laporan	2.000.000		4 laporan	2.200.000
2.15.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	12 dokumen	5.000.000	APBD	12 dokumen	5.500.000

2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dinas Perhubungan	12 laporan	492.000.000		12 laporan	541.200.000
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan			APBD		-
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perhubungan	1 paket	100.000.000		1 paket	110.000.000
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	12 dokumen	2.000.000	APBD	12 dokumen	2.200.000
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	4 dokumen	5.000.000		4 dokumen	5.500.000
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan	4 laporan	15.000.000		4 laporan	16.500.000
2.15.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Dinas Perhubungan					-

2.15.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Dinas Perhubungan						-
2.15.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Dinas Perhubungan						-
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perhubungan	50 orang	300.000.000			50 orang	330.000.000
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	50 orang	25.000.000			50 orang	27.500.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	50 orang	45.000.000			50 orang	49.500.000

2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah penyedia jasa layanan umum kantor	Dinas Perhubungan	11 kegiatan	494.000.000			11 kegiatan	543.400.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	2 unit				2 unit	-
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 paket	50.000.000			12 paket	55.000.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 paket	35.000.000			12 paket	38.500.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 paket	34.000.000			12 paket	37.400.000

2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 paket	50.000.000	APBD	12 paket	55.000.000
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 dokumen	45.000.000		12 dokumen	49.500.000
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 paket		APBD	12 paket	-
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	12 laporan	80.000.000	APBD	12 laporan	88.000.000
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	12 bulan	200.000.000		12 bulan	220.000.000
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan	12 dokumen			12 dokumen	-
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	4 kegiatan		APBD	4 kegiatan	-

2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Perhubungan	12 laporan	1.560.000.000	APBD	12 laporan	1.716.000.000
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	2 unit	250.000.000		2 unit	275.000.000
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perhubungan	2 unit	50.000.000	APBD	2 unit	55.000.000

2.15.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1 unit	760.000.000			1 unit	836.000.000
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Dinas Perhubungan			APBD			-
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perhubungan	15 unit	100.000.000			15 unit	110.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	20 unit	50.000.000	APBD		20 unit	55.000.000
2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1 unit				1 unit	-
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Dinas Perhubungan			APBD			-
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	1 unit	200.000.000			1 unit	220.000.000
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	20 unit	100.000.000			20 unit	110.000.000
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perhubungan	5 unit	50.000.000	APBD		5 unit	55.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan	Dinas Perhubungan	12 laporan	31.030.000.000	APBD		12 laporan	34.133.000.000
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	12 laporan	10.000.000	APBD		12 laporan	11.000.000

2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 laporan	31.000.000.000			12 laporan	34.100.000.000
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	4 laporan	20.000.000	APBD		4 laporan	22.000.000
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perhubungan	12 laporan				12 laporan	-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Dinas Perhubungan	12 laporan	465.000.000	APBD		12 laporan	511.500.000
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perhubungan	40 unit	40.000.000	APBD		40 unit	44.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perhubungan	40 unit	230.000.000			40 unit	253.000.000
2.15.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Dinas Perhubungan			APBD			-
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dinas Perhubungan						-

2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Perhubungan	200 unit	15.000.000	APBD		200 unit	16.500.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perhubungan	10 unit	30.000.000	APBD		10 unit	33.000.000
2.15.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perhubungan	1 unit		APBD		1 unit	-
2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dinas Perhubungan						-
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan	7 unit	100.000.000	APBD		7 unit	110.000.000
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan	80 unit	50.000.000			80 unit	55.000.000
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perhubungan						-
2.15.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Dinas Perhubungan			APBD			-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Wilayah yang terlayani Angkutan Umum		56%	1.525.000.000			61%	1.677.500.000
		Prosentase Kendaraan yang di uji		90%	1.935.000.000	APBD		92%	2.128.500.000
		Prosentase Prasarana Jalan yang tersedia		65%	7.250.000.000	APBD		65%	7.975.000.000
		Prosentase fasilitas Perlengkapan Jalan yang		72%	19.140.000.000			75%	21.054.000.000

		tersedia						
		Prosentase Terlaksananya Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ		60%	4.495.000.000	APBD		67% 4.944.500.000
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi		5 dokumen	4.350.000.000	APBD		4 dokumen 4.785.000.000
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		4 dokumen	800.000.000	APBD	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	3 dokumen 880.000.000
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 dokumen	50.000.000			1 dokumen 55.000.000
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		4 laporan	3.500.000.000	APBD		4 laporan 3.850.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan		8010 unit	18.280.000.000		Pokir, DBHCHT, BKK	8115 unit 20.108.000.000
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		5 unit	300.000.000	APBD	Nota Dinas Telah turun terkait pembanguan palang pintu dan pos jaga ; Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil,	5 unit 330.000.000

							Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		800 unit	14.180.000.000		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	750 unit	15.598.000.000
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		5 unit	200.000.000	APBD	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	10 unit	220.000.000

2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		7200 unit	3.600.000.000	APBD		7350 unit	3.960.000.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal		12 laporan	700.000.000	APBD		12 laporan	770.000.000
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun		1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	110.000.000
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun		2 unit	300.000.000		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan	3 unit	330.000.000
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		10 unit	150.000.000	APBD		10 unit	165.000.000

							Pariwisata AATP		
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	150.000.000	APBD		3 unit	165.000.000	
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya						-	
2.15.02.2.03.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir	170 wilayah	6.550.000.000	APBD	Pokir, Dau	170 wilayah	7.205.000.000	
2.15.02.2.03.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 dokumen	6.500.000.000	APBD	Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	12 dokumen	7.150.000.000	
2.15.02.2.03.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	50.000.000			12 laporan	55.000.000	
	Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.03.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	presentase kendaraan lulus uji	94%				95%		

					1.935.000.000				2.128.500.000
2.15.02.2.03.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		3 Unit	800.000.000			3 Unit	880.000.000
2.15.02.2.03.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2 orang	80.000.000			2 orang	88.000.000
2.15.02.2.03.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		7500 Unit	200.000.000	APBD		7500 Unit	220.000.000
2.15.02.2.03.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		16400 Dokumen	550.000.000			16400 Dokumen	605.000.000
2.15.02.2.03.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	55.000.000
2.15.02.2.03.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		1 laporan	20.000.000			1 laporan	22.000.000
2.15.02.2.03.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		9 Unit	150.000.000			9 Unit	165.000.000
2.15.02.2.03.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		4 laporan	35.000.000			4 laporan	38.500.000
2.15.02.2.03.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1 laporan	15.000.000	APBD		1 laporan	16.500.000

2.15.02.2.03.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		4 laporan	35.000.000			4 laporan	38.500.000
2.15.02.2.03.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan		12 kegiatan	680.000.000			12 kegiatan	748.000.000
2.15.02.2.03.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12 laporan	50.000.000		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	12 laporan	55.000.000
2.15.02.2.03.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		50 unit	150.000.000		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP	50 unit	165.000.000
2.15.02.2.03.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3 dokumen	30.000.000			3 dokumen	33.000.000
2.15.02.2.03.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		12 laporan	300.000.000			12 laporan	330.000.000

2.15.02.2.03.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		4 laporan	150.000.000			4 laporan	165.000.000
2.15.02.2.03.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen andalalin yang di tetapkan		22 dokumen	180.000.000			22 dokumen	198.000.000

2.15.02.2.03.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		2 dokumen	30.000.000			2 dokumen	33.000.000
2.15.02.2.03.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 orang	40.000.000			3 rang	44.000.000
2.15.02.2.03.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		18 laporan	30.000.000			18 laporan	33.000.000
2.15.02.2.03.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		12 laporan	80.000.000			12 laporan	88.000.000
2.15.02.2.03.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan keselamatan LLAJ		7 dokumen	145.000.000			7 dokumen	159.500.000
2.15.02.2.03.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya		2 orang	15.000.000			2 orang	16.500.000
2.15.02.2.03.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		2 laporan	10.000.000			2 laporan	11.000.000
2.15.02.2.03.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		3 laporan	20.000.000			3 laporan	22.000.000

2.15.02.2.03.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		4 laporan	50.000.000			4 laporan	55.000.000
2.15.02.2.03.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		4 laporan	50.000.000			4 laporan	55.000.000

	Angkutan Umum								
2.15.02.2.03.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		30%	850.000.000		Pokir, DBHCHT, DAU	195 armada	935.000.000
2.15.02.2.03.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		195 unit	800.000.000		Mendukung Proyek Strategis Penataan Kota Bangil, Pembangunan Kawasan Pariwisata AATP dan Penghapusan Kawasan Kemiskinan Ekstrim	195 unit	880.000.000

2.15.02.2.03.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 laporan	50.000.000			12 laporan	55.000.000
2.15.02.2.03.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah trayek perkotaan yang ditetapkan		1 trayek	210.000.000			1 trayek	231.000.000
2.15.02.2.03.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	150.000.000			1 dokumen	165.000.000
2.15.02.2.03.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	33.000.000
2.15.02.2.03.11	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	33.000.000
2.15.02.2.03.11.01	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan		1 trayek	180.000.000			1 trayek	198.000.000

2.15.02.2.03.11.02	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	150.000.000			1 dokumen	165.000.000
2.15.02.2.03.11.03	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 dokumen	30.000.000			3 dokumen	33.000.000
2.15.02.2.03.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Taksi		1 wilayah	110.000.000			1 wilayah	121.000.000
2.15.02.2.03.12.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan		1 dokumen	80.000.000			1 dokumen	88.000.000

	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.03.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	30.000.000			1 dokumen	33.000.000

2.15.02.2.03.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	55 izin	65.000.000			55 izin	71.500.000
2.15.02.2.03.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 laporan	50.000.000			12 laporan	55.000.000
2.15.02.2.03.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	15.000.000			12 laporan	16.500.000
2.15.02.2.03.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah	jumlah izin penyelenggaraan angkutan taksi yang diterbitkan	1 izin	40.000.000			1 izin	44.000.000
	Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

2.15.02.2.03.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		12 laporan	30.000.000			12 laporan	33.000.000
2.15.02.2.03.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota		4 laporan	10.000.000			4 laporan	11.000.000
2.15.02.2.03.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tarif kelas ekonomi yang di tetapkan untuk angkutan orang dalam trayek		1 dokumen	70.000.000			1 dokumen	77.000.000
2.15.02.2.03.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	55.000.000
2.15.02.2.03.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	11.000.000

	Kabupaten/Kota							
2.15.02.2.03.16	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 laporan	10.000.000			1 laporan 11.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indicator kinerja dan pagu indikatif Dinas Perhubungan berdasarkan program, kegiatan subkegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Selanjutnya setelah Dokumen RENJA Dinas Perhubungan ditetapkan, menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) Dinas Perhubungan:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati melalui kepala Dinas Perhubungan (*Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*).

- b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA Dinas Perhubungan.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

BAB V PENUTUP

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kelancaran transportasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Rencana kerja yang disusun merupakan hasil dari proses yang melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan sector perhubungan. Dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Dengan demikian, dokumen rencana kerja ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan, diadaptasi dan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen rencana kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan sesuai dengan tersedianya anggaran, maka seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan tugas secara bertahap dan kesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan berkeadilan pada umumnya demi mencapai kemaslahatan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF